

BAB I

PENDAHULUAN

Arti Penting

Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini karena Kota Bandung merupakan Kota pertama di Inonesia yang melakukan hubungan kerja sama *Sister City*. Secara tidak langsung Kota Bandung sudah memiliki banyak pengalaman dalam melakukan kerja sama *Sister City*. Selain itu, kerja sama *Sister City* Kota Bandung dan Kota Melbourne (Australia) masih cukup baru yaitu dimulai pada tahun 2019, sehingga menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai kontribusi kerja sama *Sister City* antara Kota Bandung dan Kota Melbourne (Australia) terhadap Kota Bandung.

A. Latar Belakang Masalah

Bandung merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jawa Barat, hal ini secara tidak langsung menjadikan Kota Bandung sebagai pusat perekonomian. Tersedianya tranportasi darat dan udara juga memudahkan akses para pengunjung yang ingin berkunjung ke Kota Bandung, baik pengunjung domestik maupun internasional. Kota Bandung juga dikenal sebagai kota Pariwisata karena memiliki tempat wisata berbagai jenis yaitu wisata budaya, wisata alam, wisata *fashion*, dan wisata sejarah. (Fitri & Rani, 2013) Wisata-wisata ini yang harus Pemerintah Kota Bandung tingkatkan agar semakin meningkatnya perekonomian yang dimiliki oleh Kota Bandung.

Kota Bandung juga menjadi daya Tarik para investor untuk melakukan investasi di Kota bandung dikarekan Kota Bandung merupakan salah satu kota yang menjadi pusat perekonomian di Indonesia, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang jelas, dukungan dalam bidang infrastruktur yang maksimal, dan memiliki sistem pemerintahan yang kooperatif dan demokratis. Saat ini, Kota Bandung dianggap sebagai Kota berkumpulnya seluruh kegiatan bisnis seperti industri, perdagangan, dan jasa bagi daerah-daerah disekitarnya. Hal tersebut kemudian menjadikan Bandung sebagai Kota yang terhubung melalui struktur yang berfungsi dengan baik dan memadai.

Kota Bandung belum lama ini mencoba untuk melakukan penerapan *smart city* di kotanya dengan tujuan untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tentang Kota Bandung. Kota Bandung juga merupakan salah satu kota yang pertumbuhannya semakin tinggi, sehingga membutuhkan sistem perkotaan yang lebih baik. Maka dari itu, di zaman yang sudah maju ini, kemampuan pengawasan dari Pemerintah Kota Bandung perlu ditingkatkan dengan melakukan pengawasan kota secara *realtime* sehingga diharapkan dapat memecahkan masalah secara efisien dan efektif. (Mursalin, 2017) Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung melakukan kerja sama dengan kota-kota di luar negeri dengan tujuan untuk belajar tentang melakukan penerapan *smart city* yang baik dan efisien agar dapat mempermudah pemerintah dan masyarakat Kota Bandung.

Adanya globalisasi menjadi factor utama dan alasan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menjalin kerja sama karena setiap negara saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Biasanya negara-negara saling membutuhkan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan Pendidikan. Dengan adanya hubungan internasional, menjadikan berdiplomasi sebagai hal yang utama bagi suatu negara sebagai faktor eksistensi negara tersebut dalam hubungan internasional. Diplomasi merupakan suatu proses politik yang digunakan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah guna mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain. (Suryokusumo, 2004)

Keadaan Kota Bandung dengan keunggulan yang dimiliki memudahkan Kota Bandung untuk bersaing di dunia global. Adanya kebijakan otonomi daerah yang dimiliki Kota Bandung, menuntut Pemerintah daerah Kota Bandung untuk mandiri agar tidak selalu bergantung kepada Pemerintah Pusat. Hal ini juga mendorong Pemerintah daerah lainnya untuk hadir sebagai aktor baru dalam kerja sama internasional dan hubungan internasional guna mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, seperti potensi manusia dan alam, serta memaksimalkan pendapatan daerah agar dapat melakukan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerahnya. Kota Bandung memiliki solusi untuk meningkatkan potensi dengan mengembangkan jaringan kerja sama pemerintahan. Kerja sama tersebut tidak hanya dilakukan dengan daerah lain di Indonesia, tetapi

juga melakukan kerja sama dengan daerah di luar negeri atau yang dikenal dengan sebutan *Sister City*.

Sister City atau *Twin City* merupakan suatu kerja sama luar negeri antar Kota dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan juga kerja sama yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang, biasanya kota tersebut memiliki kemiripan karakteristik, misalnya seperti kemiripan latar belakang sejarah, kemiripan budaya, dan juga kemiripan geografis. Pada tahun 1920 *Sister City* pertama kali dilakukan oleh Kota Keighley, Inggris dengan Kota Poix Du Nord, Perancis. Kerja sama *Sister City* menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi perkembangan yang luar biasa dalam kehidupan saat ini, kerja sama ini dipengaruhi oleh ketidakmampuan setiap Individu atau suatu Daerah dalam memenuhi keinginannya dengan hanya mengandalkan potensi yang ada, sehingga dibutuhkan suatu kerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pelaksanaan kerja sama *Sister City* harus bertumpu pada peraturan dan tata tertib administrasi yang telah ditetapkan kedalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Pelaksanaan kerja sama *Sister City* ini juga harus sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki, ketersediaan Sumber daya manusia, dan selaras dengan potensi yang dimiliki. (BANDUNG B. K., Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL), 2021)

Adanya peluang dalam menjalin kerja sama menjadi dasar kota-kota yang ingin melaksanakan *Sister City*, sehingga kota-kota tersebut harus memikirkan kebijakan dan strategi yang diterapkan sebelum menjalin kerja sama *Sister City*. Kerja sama yang dijalin oleh Kota Bandung dengan kota-kota lain tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan di Kota Bandung. Kerja sama yang dibentuk haruslah memiliki program yang terencana dan terstruktur agar berjalan dengan baik, misalnya dengan memikirkan biaya yang digunakan untuk menjalin kerja sama, waktu yang diperlukan dalam sebuah kegiatan, dan bidang-bidang yang akan dilakukan kerja sama. Kerja sama *Sister City* ini diharapkan bisa menjadi jembatan antar kota yang melakukan kerja sama untuk dapat saling berbagi pengalaman dalam pembangunan kota, tukar menukar pengetahuan, tukar menukar

C. Kerangka Teoritis

Guna menjelaskan kontribusi kerja sama Sister City antara Kota Bandung dan Kota Melbourne (Australia) terhadap Kota Bandung, penulis menggunakan konsep dalam ilmu hubungan internasional. Hal tersebut bertujuan agar penelitian ini dapat terkonsep dengan baik. Adapun teori atau konsep yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Konsep Paradiplomasi dan konsep *Sister City*.

1. Konsep Paradiplomasi

Konsep Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif yang terjadi kepada actor-aktor sub-nasional, kebijakan politik dan intitusi pemerintahan pusat yang memiliki wewenang untuk menjalankan hubungan luar negeri, karena Pemerintahan daerah merupakan penerapan dari kebijakan masyarakat. Hal ini ini berbeda dengan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh suatu negara, untuk mengembangkan suatu daerah, actor-aktor daerah diberikan kebebasan untuk tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan kebijakannya, para aktor tersebut berada dibawah kedaulatan negara, serta mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, yang kemudian menjadikan negara sebagai actor yang menghubungkan dasar terjadinya suatu hubungan. (Mukti, Paradiplomacy Kerja sama Luar Negeri oleh pemda di Indonesia, 2013)

Paradiplomasi masih merupakan suatu hal baru bagi Hubungan Internasional. Istilah ‘Paradiplomasi’ awalnya dikemukakan pada tahun 1980-an oleh Panayotis Soldatos yang merupakan ilmuan asal Basque. Paradiplomasi merupakan penggabungan kata dari istilah “Parallel Diplomacy”. Menurut Keating, Boyer, dan Aldecoa istilah tersebut merujuk pada makna “*the foreign policy of non-central governments*”. Istilah lain yang digunakan oleh Ivo Duchacek pada tahun 1990 yaitu konsep “*micro-diplomacy*”. (Mukti, Paradiplomacy Kerja sama Luar Negeri oleh pemda di Indonesia, 2013)

Soldatos (1990) membagi tipe paradiplomasi menjadi 2 yang menyangkut cakupan isu dalam paradiplomasi: (Stivani, 2014)

1. Global Paradiplomasi

Dalam tipe ini, Pemerintah sub nasional ikut serta dalam isu-isu global dan politik tingkat tinggi. Contohnya yaitu saat Gubernur New Jersey dan New

York membentuk kebijakan melarang pendaratan pesawat Uni Soviet di wilayah mereka dikarenakan reaksi atas penembakan pesawat Korean Airlines. Hal ini Kembali lagi kepada tugas pemerintah sub nasional yang biasanya terlibat dalam isu-isu politik. Global Paradiplomasi rini relative jarang terjadi.

2. Regional Paradiplomasi

Dalam Regional Paradiplomasi, Pemerintah sub bertanggung jawab terhadap isu-isu yang cakupannya berskala regional. Tipe ini menyangkut isu-isu politik tingkat rendah dan jarang menimbulkan kontroversi. Apabila isu ini tersebut mengenai komunitas yang berbatasan langsung secara geografis (*Geographical contiguity*) Soldatos menyebutnya sebagai makroregional paradiplomasi dan apabila komunitas tersebut tidak berbatasan langsung disebut mikroregional paradiplomasi.

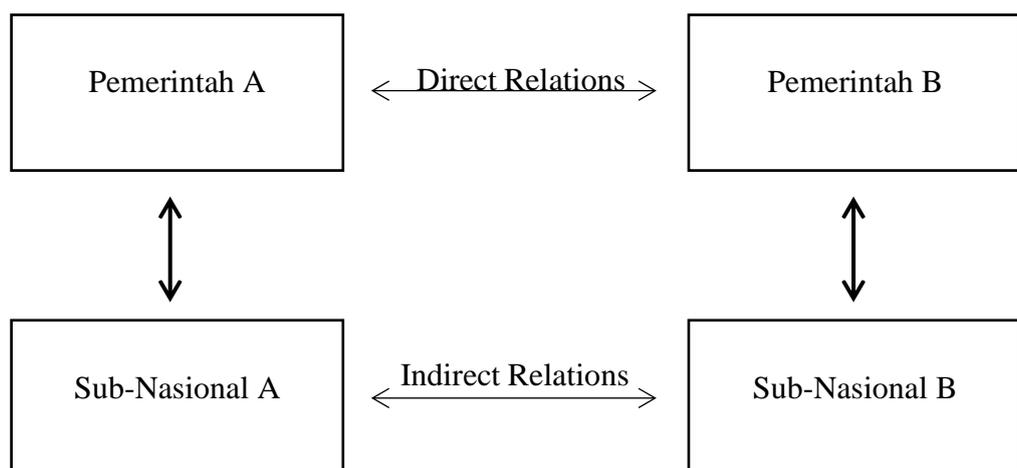
Soldatos dalam penjelasan kerangka Studi Negara Federal sebagai actor kebijakan luar negeri: Peran Unit sub-nasional menyebutkan faktor-faktor paradiplomasi, yaitu: (Mukti, Paradiplomacy Kerja sama Luar Negeri oleh pmda di Indonesia, 2013)

1. Adanya ketidakseimbangan dan representative unit sub nasional dan unit nasional di Hubungan Internasional.
2. Kegiatan diplomasi bisa terinspirasi dari fenomena internasional yang mudah diartikan untuk mengikuti peringkat pada sesuatu yang mengakibatkan terbentuknya su unit lainnya.
3. Usaha kedua belah pihak dengan tujuan mencapai kepentingan berdasarkan perbedaan budaya, geografis, agama, politik, Bahasa, dan factor lainnya yang berbeda antar kedua pihak tersebut.
4. Domestikasi kebijakan luar negeri sebagai suatu akibat dari adanya isu-isu politik yang dianggap telah mendorong pemerintah daerah agar memiliki suatu kemampuan dalam melakukan paradiplomasi.

5. Adanya kesenjangan dalam melakukan perumusan suatu kebijakan luar negeri dan ketidakefisiensian dalam melakukan hubungan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah pusat.
6. Problematika yang terkait dengan pembangunan suatu bangsa dan konstitusional juga dapat mendukung pemerintah daerah dalam melakukan paradiplomasi.
7. Perkembangan kelembagaan dan ekonomi secara alami dalam unit sub nasional dari pemerintah daerah memotivasi untuk mengembangkan perannya.

Paradiplomasi juga bisa disebut sebagai kerja sama tidak langsung antar daerah di negara dengan wilayah di negara lain, tidak langsung di sini berarti dalam hal pelaku, disebut tidak langsung karena actor yang menjalankan kerja sama ini merupakan sub nasional (pemerintah daerah) dan bukan pemerintah pusat. Dalam kerja sama yang dilakukan oleh Kota Bandung dan Kota Melbourne dapat kita lihat bahwa kedua kota tersebut melakukan kerja sama tidak langsung karena Kota Bandung dan Kota Melbourne merupakan aktor sub nasional (pemerintah daerah). Hal ini diperjelas melalui skema berikut: (Jatmika, 2001)

Skema Hubungan Paradiplomasi



2. Konsep Sister City

Pengertian tentang hubungan kerja sama *Sister City* menurut Sidik Jatmika dalam buku Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional yaitu sebagai berikut:

“Hubungan kerja sama kota bersaudara yang dilaksanakan antara pemerintah Kabupaten, Kota, dan Kota administratif dengan pemerintah kota setingkat diluar negeri. Hubungan kerja sama yang dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang masing-masing pihak, dan lamanya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan program kegiatan yang dikerjasamakan”. (Jatmika, 2001)

Berdasarkan konsep *sister city* yang telah dijelaskan diatas, maka kerja sama *sister city* dapat dilakukan apabila kedua kota memiliki status tingkat administrative yang setara. Kerja sama tersebut juga harus mempunyai misi program dan tujuan yang jelas guna meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Kemudian, kerja sama ini juga dapat dilakukan selama tidak melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dan tetap menjaga tingkat stabilitas politik yang ada. Begitupun halnya dengan kerja sama yang dilakukan oleh Bandung dan Melbourne, kedua kota tersebut memiliki status administratif yang sama yaitu setingkat kota. Kerja sama yang dilakukan oleh Kota Bandung dan Kota Melbourne juga jelas yaitu dalam bidang *smart city* dan ekonomi perdagangan, yang mana nantinya Kota Bandung dan Kota Melbourne dapat saling bertukar informasi dan teknologi guna membangun tata kota dan perekonomian yang lebih efektif dan efisien. Kerja sama antara kedua kota tersebut dapat berjalan karena kota tersebut berpedoman kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan dimasing-masing negara sebagai acuan untuk melakukan kerja sama *sister city* antara kedua kota tersebut.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian menimbulkan hipotesis atau jawaban sementara dari pokok permasalahan penelitian yaitu Kota Bandung mendapatkan banyak keuntungan dari kerja sama *Sister City* dengan Kota Melbourne karena Kota Melbourne lebih maju dibandingkan dengan Kota Bandung.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif analitis yaitu penelitian yang sifatnya memberikan gambaran kondisi yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian dari hasil tersebut dilanjutkan dengan analisis yang nantinya akan menjadi kesimpulan yang analitik. Tipe analitik ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut bersangkutan dengan masalah penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta kerja sama *Sister City* yang terjalin antara Kota Bandung dengan Kota Cuenca.

Pada penelitian ini penulis berupaya menjelaskan kontribusi kerja sama *Sister City* antara Bandung dan Melbourne (Australia) terhadap Kota Bandung (periode 2019-2021).

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan Metode Kepustakaan (*library research*) dan metode wawancara untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Metode kepustakaan menekankan pada pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur buku Pustaka, majalah, jurnal, makalah ilmiah, internet, berita online, surat kabar harian, serta sumber-sumber lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode wawancara nantinya penulis akan melakukan tanya jawab kepada narasumber yang berkaitan terhadap penelitian ini guna mendapatkan informasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

3. Metode Analisa Data

Pada metode analisa data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dimana data-data dan fakta tertulis yang diperoleh dalam kepustakaan dan wawancara yang dikaji kemudian nantinya akan dikelola berdasarkan kerangka teori yang digunakan oleh penulis.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dibahas oleh penulis yaitu guna mengetahui lebih dalam mengenai keuntungan yang didapatkan oleh Kota Bandung dengan melakukan kerja sama dengan Kota Melbourne

G. Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Lokasi penelitian secara langsung dilaksanakan di Kota Bandung yang bertempat di Intansi Pemerintah Bagian Kerja sama Kota Bandung.

Jangkauan penelitian bertujuan untuk menghindari semakin melebarnya pembahasan yang dianalisa oleh penulis dalam penelitian. Hal ini akan mempersempit area pembahasan penelitian dan akan mempermudah penulis untuk fokus pada masalah yang akan dikaji. Pencarian data akan difokuskan pada awal terbentuknya kerja sama *Sister City* antara Kota Bandung dan Kota Melbourne pada tahun 2019. Batasan waktu tersebut digunakan untuk memantau perkembangan dan hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Kota Bandung dan Kota Melbourne semenjak terbentuknya kerja sama antara kedua kota tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menggunakan data dari luar batasan waktu tersebut dengan tujuan untuk mendukung analisa permasalahan penelitian agar lebih detail dan terperinci.

H. Sistematika Penulisan

Agar menghasilkan Penulisan Penelitian yang terpadu, maka penulis akan membagi pemaparan penelitian ke dalam beberapa bab. Dimana, setiap bab akan memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul “**KEUNTUNGAN KOTA BANDUNG DALAM MELAKUKAN KERJA SAMA SISTER CITY DENGAN KOTA MELBOURNE AUSTRALIA (PERIODE 2019-2021)**” adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, lokasi dan jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Proses Pengambilan Keputusan *Sister City* Kota Bandung

Merupakan bab yang akan menjelaskan pertimbangan kerja sama Kota Bandung dalam melakukan kerja sama dengan Kota Melbourne, tahapan kerja sama *Sister City* yang dilakukan oleh Kota Bandung, serta landasan kerja sama *Sister City* Kota Bandung.

BAB III: Temuan: Keuntungan Bagi Kota Bandung

Pada bab ini, penulis akan membuktikan hipotesa yang akan menjelaskan keuntungan kerja sama Sister City Kota Bandung dengan Kota Melbourne terhadap Kota Bandung.

BAB IV: Kesimpulan

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.